

RIVALITAS ARAB SAUDI-IRAN DI YAMAN ERA ARAB SPRING

2010-2016

Ahmad Fanani

alamatefanani@gmail.com

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrack

The competing powers of Saudi Arabia and Iran continue to redress and reverse the strategic imbalance and direction of the Middle East's regional politics. The 1979 Iranian Revolution catapulted these two states into an embittered rivalry. The fall of Saddam Hussein following the 2003 U.S. led invasion, the establishment of a Shi'ite Iraq and the 2011 Arab Uprisings have further inflamed tensions between Saudi Arabia and Iran. Iran and Saudi Arabia have not confronted each other militarily, but rather have divided the region into two armed camps on the basis of political and religious ideology in seeking regional allies and promulgating sectarianism as they continue to exploit the region's weak states in a series of proxy wars ranging from conflicts in Iraq to Lebanon.

The Saudi-Iranian strategic and geopolitical rivalry is further complicated by a religious and ideological rivalry, as tensions represent two opposing aspirations for Islamic leadership with two vastly differing political systems. The conflict is between Saudi Arabia, representing Sunni Islam via Wahhabism, and Iran, representing Shi'ite Islam through Khomeinism. The Saudi-Iranian strategic and geopolitical rivalry is further complicated by a religious and ideological rivalry, as tensions represent two opposing aspirations for Islamic leadership with two vastly differing political systems. The conflict is between Saudi Arabia, representing Sunni Islam via Wahhabism, and Iran, representing Shi'ite Islam through Khomeinism. The Saudi-Iranian rivalry has important implications conflict and stability in Yemen afterward Arab Spring Uprising. Therefore, this research seeks to address the question: What is led Saudi and Iranto involve massively in Yemen's Conflict afterward Arab Spring 2011-2016?

Key Word: Rivalry, Arab Spring, Sphare of Influence, Conflict

Pendahuluan

Gelombang musim semi Arab (Arab Spring) telah banyak mengubah konfigurasi politik di Timur Tengah. Gelombang yang di dasari oleh tuntutan akan demokratisasi ini telah melanda sebagian besar negara di Timur Tengah mulai dari Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, sampai Yaman. Selain memicu perubahan peta politik di internal negara-negara yang terkait, gelombang ini juga turut mempengaruhi perubahan situasi di kawasan, salah satunya rivalitas Arab Saudi dan Iran. Guncangan gelombang musim semi arab ini memanaskan kembali rivalitas kedua negara berpengaruh di kawasan tersebut.

Musim Semi Arab (Arab Spring) adalah rentetan gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi didunia Arab, meski tidak semuanya dilakukan oleh orang Arab. Dimulai sejak 18 Desember 2010, telah terjadi revolusi di Tunisia dan Mesir; perang saudara di Libya; pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah, dan Yaman; protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, dan Oman; dan protes kecil di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, dan Sahara Barat. Kerusuhan di perbatasan Israel bulan Mei 2011 juga terinspirasi oleh kebangkitan dunia Arab ini.

Rentetan protes ini terjadi dalam beberapa pola, diantaranya adalah pemberontakan sipil, kampanye yang melibatkan serangan, demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media sosial, seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Skype, untuk mengorganisir, berkomunikasi, dan meningkatkan kesadaran terhadap usaha-usaha penekanan dan penyensoran Internet oleh pemerintah. Banyak unjuk rasa yang ditanggapi secara keras oleh pihak berwajib maupun milisi dan pengunjuk rasa yang pro-pemerintah. Selama hampir enam tahun Arab Spring bergulir dari akhir 2010, Saudi dan Iran telah terlibat dalam bentrok kepentingan di berbagai negara konflik. Bentrokan tersebut terjadi dalam berbagai pola dan intensitas yang berbeda.

Tahun 2011, Arab Saudi mengirimkan tentaranya untuk membantu Bahrain, sekutu dekat yang saat itu dilanda unjuk rasa besar-besaran. Saudi khawatir oposisi Syiah di Bahrain akan bersekutu dengan Iran dengan memanfaatkan situasi itu. Saudi dan Bahrain kemudian menuding Iran sengaja menggerakkan aksi kekerasan terhadap polisi Bahrain. Kawat diplomatik Amerika Serikat yang dibocorkan WikiLeaks menunjukkan bahwa para pemimpin Saudi, termasuk Raja Abdullah, mendorong AS untuk mengambil posisi tegas melawan program nuklir Iran.

Otoritas Saudi menuding sejumlah warga Syiah di Provinsi Timur, termasuk ulama Nimr Baqr al-Nimr yang dieksekusi mati pada 2 Januari lalu, bekerja sama dengan negara asing, merujuk pada Iran, dalam memancing pertikaian, setelah terjadi bentrokan antara polisi dan warga Syiah di kawasan itu. Secara terpisah, AS mengklaim berhasil menggagalkan rencana pembunuhan Duta Besar Saudi untuk AS oleh Iran. Saat itu, otoritas Saudi mengatakan, bukti soal rencana pembunuhan itu sangat banyak dan menegaskan Iran akan mendapat balasannya.

Tahun 2012, Arab Saudi menjadi pendukung utama kelompok pemberontak Suriah yang berusaha menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad, yang merupakan sekutu Iran. Saudi terang-terangan menuding Assad telah melakukan genosida dan menyebut Iran memanfaatkan situasi untuk menduduki Suriah. Iran menuding balik Saudi sebagai pendukung terorisme.

Pada Maret 2015, otoritas Saudi memulai serangan udara di Yaman untuk memerangi pemberontak Houthi, yang merupakan sekutu Iran, yang berniat mengambil alih pemerintahan. Saat itu, Saudi menuding Iran sengaja memanfaatkan Houthi untuk mengukudeta pemerintah Yaman yang kala itu dipimpin Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi. Lagi-lagi, Iran pun menuding serangan udara Saudi menargetkan banyak warga sipil di Yaman.

Kebijakan luar negeri Arab Saudi selama ini selalu mengedepankan upaya perdamaian, tetapi terkait dengan konflik yang terjadi di Yaman Arab Saudi

merupakan salah satu pihak luar yang ikut terlibat dalam konflik internal Yaman. Arab Saudi dan Yaman merupakan dua Negara yang memiliki hubungan sejarah konflik yang panjang, konflik perbatasan tidak terlepas oleh kedua belah pihak terkait dengan sengketa pulau-pulau di Laut Merah. Sebelum berintegrasi, Yaman Utara maupun Selatan memiliki hubungan yang kurang begitu harmonis dengan Arab Saudi. Arab Saudi menganggap keberadaan Yaman Utara yang Republik merupakan ancaman bagi kelangsungan kehidupan kerajaan (royalis) yang dianutnya.

Perang di Yaman antara kelompok Houthi dan pasukan pemerintah Yaman tak bisa lepas dari peta politik perseteruan sengit antara Arab Saudi dan Iran. Rivalitas sektarian antara kaum Sunni dan Syiah dalam perebutan kekuasaan di Yaman juga mulai tampak. Hal itu nampak dari apa yang dilakukan oleh Arab Saudi pada tanggal 26/3/2015, Arab Saudi dan sembilan negara Teluk resmi melancarkan agresi militer di Sanaa, Yaman. Mereka beralih, agresi itu untuk memerangi kelompok Houthi dan menyelamatkan pemerintah sah Yaman di bawah kepemimpinan Presiden Mansour Hadi.

Kelompok Houthi yang didominasi kaum Syiah dikenal sebagai sekutu utama Iran. Pemerintah Iran sendiri belum bereaksi setelah sekutunya di Yaman dikeroyok 10 negara Teluk. Beberapa pengamat Timur tengah melihat rivalitas Saudi dan Iran ikut mewarnai perang di Yaman. Iran yang hampir mencapai kesepakatan nuklir dengan enam negara kekuatan dunia sudah membuat Arab Saudi resah.

Pemberontakan al-Houthi di Yaman yang terjadi sebenarnya merupakan kelanjutan peristiwa pembantaian Hussein al-Houthi di tahun 2004 silam. Pemerintah Yaman di selatan menuding al-Houthi ingin merubah sistem pemerintahan menjadi Imamah. Sedangkan Houthis yang didukung penduduk Yaman Utara menuding pemerintah Yaman melakukan diskriminasi dan

marginalisasi ekonomi di kawasan Sa'da di utara Yaman. Motif ideologis juga berperan. Isu penyeimbangan antara komunitas Salafi dan Zaidi juga tersebar.¹

Al-Houthi merupakan kelompok pemberontak yang berbasis di Yaman Utara. Pengikut al-Houthi terkenal dengan sebutan Houthis. Nama kelompok Syiah Zaidiyah itu diambil dari nama keluarga al-Houthi, dan Badaruddin al-Houthi termasuk pembesar keluarga itu yang merupakan pengikut Syiah Zaidiyah Jurudiyah dan salah satu ulama besar Syiah di kawasan. Hussein al-Houthi yang merupakan anak dari Badaruddin al-Houthi dan sekaligus pemimpin kelompok pejuang itu, meninggal dunia dalam pertempuran dengan tentara pemerintah Yaman.

Saat ini, kepemimpinan kelompok itu berada di tangan Abdul-Malik al-Houthi, putra dari Hussein al-Houthi. Meleburnya sebagian pengikut Zaidiyah ke dalam barisan pemberontak Houthi, bukan sepenuhnya karena kedekatan ideologi, tapi juga faktor kemiskinan Yaman Utara akibat ketidakadilan pemerintah di Yaman Selatan.

Pada bulan Agustus 2009, tentara Yaman melancarkan serangan besar-besaran yang disebut Operasi Bumi Hangus, untuk menghadapi pemberontakan yang melawan pemerintah Yaman. Sebagian besar pertempuran terjadi di wilayah pemerintahan Sa'dah di barat laut Yaman. Pada 11 Agustus 2011, tentara Yaman melanggar kesepakatan gencatan senjata dan menyerang kelompok al-Houthi. Kebijakan represif pemerintah lewat Operasi Bumi Hangus hingga kini belum mampu menumpas perlawanan kelompok Syiah itu. Di pihak lain, kelompok al-Houthi yang menempati dan menguasai kawasan pegunungan di provinsi Sa'dah, utara Yaman berhasil mengontrol 14 kabupaten dari 15 kabupaten di provinsi dan hanya kota Sa'dah yang belum dikuasai oleh kelompok pejuang itu.

Konflik yang terjadi di Yaman merupakan kelanjutan dari pemberontakan Syiah Houthi. Hingga tanggal 21 September 2014, ibukota Yaman, Sanaa jatuh ke

¹“Siapa Suku Houthi di Yaman”, dalam http://www.sabili.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=771:siapa-suku-houthi-di-yaman&catid=85:lintas-dunia&Itemid=284, diakses 22 April 2015

tangan Houthi. Februari 2015, Presiden Yaman, Abd Rabbuh Mansour Hadi melarikan diri ke Aden dari ibukota Sanaa. Sebelumnya dia telah disandera sebagai tahanan rumah oleh pemberontak Houthi selama beberapa pekan. Dan pada Maret 2015, Presiden Mansour Hadi mengumumkan pemindahan ibukota dan menjadikan kota Aden sebagai ibukota negaranya. Dia juga menyatakan bahwa ibukota Sanaa telah menjadi “kota yang diduduki” oleh pemberontak Syiah.

Karena desakan separatis Houthi yang kian kuat, akhirnya beliau mengirim surat ke beberapa negara teluk. Surat yang sangat menyentuh. Presiden Mansour Hadi menceritakan kondisi Yaman yang sudah berada di ambang kehancuran, sehingga membutuhkan pertolongan dari “para saudaranya”. Presiden menuliskan suratnya dengan sapaan “al-Akh” (saudara) bagi para pemimpin negara teluk.²

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Saud al Faisal mengatakan kerajaan Arab Saudi siap untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi krisis politik di Yaman. Kami ingin melindungi kedaulatan dan legitimasi Pemerintah Yaman yang diwakili oleh Presiden Hadi. Kami berharap krisis itu dapat diselesaikan dengan damai dan kami siap untuk menjawab setiap permintaan Presiden Hadi, apapun itu untuk mendukungnya.

Pemimpin kelompok al-Houthi, Abdul-Malik al-Houthi menyatakan bahwa tentara Arab Saudi sejak awal pecahnya perang saudara di Yaman, aktif membantu pasukan pemerintah Yaman. Dikatakannya, Kebijakan anti warga Yaman yang ditunjukkan oleh pemerintah Arab Saudi bukan masalah baru. Serangan Arab Saudi ke wilayah Yaman dengan dalih memerangi pejuang Syiah memiliki beragam dampak. Pada tingkat pertama, serangan itu merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Yaman dan melanggar aturan internasional.

Aksi sepihak pemerintah Arab Saudi telah meningkatkan solidaritas warga Ahlu Sunnah Yaman terhadap komunitas Syiah Houthi, sebab mayoritas warga

²“Arab Saudi Siap Lindungi Yaman”, dalam <http://www.waspada.co.id/2015/03/27/arab-saudisiap-lindungi-yaman>, diakses 22 Maret 2016

Ahlu Sunnah Yaman menganut mazhab Imam Syafii dan memiliki banyak kesamaan dan kedekatan dengan mazhab Syiah. Mereka juga menentang kelompok Wahabi yang menguasai Arab Saudi.³

Pada Maret 2015, Arab Saudi melancarkan serangan militer besar-besaran di Yaman untuk memberantas para pemberontak Syiah Houthi. Saudi mengerahkan 100 pesawat tempur dan 150 ribu tentara untuk operasi militer ini. Dalam agresi ini, turut dibantu 8 negara arab serta dukungan Inggris dan Amerika. Selain itu, pesawat-pesawat dari Mesir, Maroko, Yordania, Sudan, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar dan Bahrain juga ikut serta dalam operasi besar-besaran ini. Kampanye ini tujuannya untuk mencegah para pemberontak Houthi menggunakan bandara-bandara dan pesawat untuk menyerang Aden dan bagian-bagian Yaman lainnya serta mencegah mereka menggunakan roket-roket. Sebelumnya dalam statemen bersama, lima negara Teluk Arab: Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain dan Qatar telah memutuskan untuk bertindak melindungi Yaman dari apa yang mereka sebut sebagai agresi milisi Houthi yang didukung Iran.⁴

Rivalitas Saudi dan Iran di Yaman menarik di cermati karena di negara miskin tersebut sikap Saudi begitu keras dengan melakukan kampanye militernya, sikap yang oleh beberapa pengamat di pandang tak lazim mengingat selama ini Saudi cenderung melakukan pendekatan damai dalam menghadapi konflik.

Beberapa pengamat menyebut Iran dan Arab Saudi terlibat dalam perang proksi. Kedua negara tak berperang secara langsung, tapi turut terlibat jauh dalam konflik yang terjadi di negara-negara kawasan. Arab Saudi menyokong penuh rezim Bahrain dan Yaman, sedangkan Iran menyokong pihak oposisi di Bahrain dan Yaman. Iran juga mendukung penuh rezim Suriah, sedangkan Arab Saudi mensponsori pihak oposisi di Suriah.

³“Intervensi Arab Saudi Dalam Konflik Yaman”, dalam <http://indonesian.ws.irib.ir/ranah/telisik/item/33833-intervensi-arabsaudi-dalam-konflik-yaman?tmpl=component&Print=1>, diakses 22 Maret 2016

⁴“Militer Arab Saudi dan 8 Negara Gempur Yaman Harga Minyak Dunia Langsung Naik”, dalam <http://www.jurnalasia.com/2015/03/27/militer-arab-saudi-dan-8-negara-gempur-yaman-harga-minyak-dunia-langsung-naik/#>, diakses 17 April 2015

Merujuk riwayat hubungan Saudi – Iran dan besarnya pengaruh keduanya dikawasan, menarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana Rivalitas Arab Saudi dan Iran Pasca di Yaman Pasca Arab Spring 2011-2016.

Dinamika Hubungan Saudi Iran

Rivalitas antara Arab Saudi dan Iran tak muncul begitu saja dalam ruang hampa, melainkan terbentuk oleh sejarah panjang sejak keduanya menjadi negara modern. Pernah menjalin hubungan yang cukup harmonis, sejak revolusi Iran pada 1979, praktis hubungan keduanya cenderung diwarnai oleh berbagai konflik dan ketegangan. Sebagai dua negara yang memegang peranan kunci di Timur Tengah, keduanya saling berebut pengaruh untuk menjadi negara hegemon yang mengendalikan negara-negara kecil di kawasan.

Meski nyaris tak pernah terlibat dalam pertempuran militer secara langsung, tapi keduanya banyak bertrok kepentingan di berbagai negara yang tengah berkonflik. Untuk memahami kondisi mutakhir rivalitas dua negara berpengaruh ini, penting untuk melacak kembali riwayat hubungan keduanya. Catatan riwayat hubungan keduanya penting untuk memberikan gambaran secara utuh sehingga bisa didapatkan konteks yang tepat.

Arab Saudi mempunyai hubungan bilateral yang cukup rumit dengan Iran. Meskipun dua negara ini merupakan negara Islam, namun hubungan keduanya banyak dibangun dari ketegangan dan konflik. Pemerintah Riyadh berbenturan kepentingan dengan Teheran dalam banyak isu mulai geo-politik, politik minyak, sikap terhadap Amerika Serikat dan Barat, serta ambisi atas tongkat kepemimpinan Islam.

Sebagaimana dibahas sebelumnya, Arab Saudi merupakan negara monarki absolut yang menganut Sunni sebagai aliran resmi negara. Sedangkan Iran merupakan negara mayoritas Syiah dengan bentuk Republik Presidensial Islam yang menjadikan isu revolusi islam sebagai salah satu kampanye utamanya. Saudi membangun hubungan dekat dengan Amerika Serikat dan Barat sedangkan Iran

pasca revolusi konsisten membangun isu anti-barat. Iran bahkan menuding Arab Saudi sebagai antek barat yang menjadi penjaga kepentingan barat di kawasan.

Perbedaan aspirasi dan sikap tersebut menempatkan keduanya dalam rivalitas yang cukup sengit. Berbagai perbedaan mendasar antara Saudi dan Iran ini melahirkan ketegangan yang terjadi mulai dari perang kata-kata antara elit pimpinan kedua negara, sampai perang proksi di negara-negara dimana terdapat perbedaan kepentingan keduanya. Gambaran ketegangan keduanya tampak jelas dalam pernyataan keras Raja Abdullah yang mengatakan bahwa di dunia ini ada dua negara yang tak layak eksis, yaitu Iran dan Israel. Pernyataan tersebut dikatakan Raja Abdullah kepada Harve Morin, Mantan Menteri Pertahanan Perancis. Mantan pemimpin tertinggi kerajaan Saudi tersebut juga di sebut sempat mendesak Amerika Serikat untuk menyerang Iran dan menghentikan program senjata nuklirnya. Dengan nada sarkastis, Abdullah menyebut Iran merupakan kepala ular yang mesti dipotong.⁵

Dari pihak Iran, Ayatollah Khomeini, Bapak Revolusi negara tersebut pernah mengatakan dengan nada yang tak kalah keras bahwa Saudi merupakan pengkhianat kaum muslim, berikut pernyataan lengkap Khomeini yang memicu pemutusan hubungan diplomatik kedua negara antara tahun 1987 sampai 1991:

“...these vile and ungodly Wahhabis, are like daggers which have always pierced the heart of the "Muslims" from the back,” and announced that Mecca was in the hands of “a band of heretics.”⁶

Ketika masih menjadi Presiden, Ahmadinejad juga pernah melontarkan sindiran keras yang ditujukan kepada Arab Saudi. Ahmadinejad mengatakan bahwa negara-negara barat melancarkan invasi ke Afghanistan dan Irak sebagai balasan atas peristiwa 11 September, padahal basis utama Al Qaeda ada di negara lain yang masih leluasa menikmati keuntungan luar biasa dari minyak dan

⁵["Iran's Ahmadinejad dismisses Wikileaks cables release". BBC News. 29 November 2010. http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11860435](http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11860435). Di akses pada 18 April 2016

⁶[Khomeinis messengers in mecca](http://martinkramer.org/sandbox/reader/archives/khomeinis-messengers-in-mecca) Martin Kramer. <http://martinkramer.org/sandbox/reader/archives/khomeinis-messengers-in-mecca>. Diakses pada 18 April 2016

mempunyai hubungan sangat erat dengan Amerika Serikat dan Negara Barat lain. Lebih lanjut, Ahmadinejad menegaskan bahwa negara tersebut sama sekali tak pernah melaksanakan pemilihan demokratis, melarang perempuan berkendara, tapi Amerika Serikat dan negara barat lain malah mendukung negara yang tak demokratis tersebut.⁷

Hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran dibangun pertama kali pada tahun 1928. Pada tahun 1966, pemimpin Saudi saat itu, Raja Faisal, melakukan kunjungan kenegaraan ke Iran untuk memperkuat hubungan antara kedua negara. Kunjungan tersebut segera dibalas oleh Shah Iran yang sekaligus melahirkan resolusi damai atas kasus perselisihan pulau Farsi dan Arabi. Kesepakatan tersebut menyerahkan pulau Farsi pada kedaulatan Iran dan memberikan kedaulatan penuh pada Arab Saudi atas Pulau Arabi.⁸ Ketika Inggris menyatakan penarikan mundur pasukanya dari Teluk Persia pada tahun 1968, Saudi dan Iran mengambil langkah bersama untuk menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan tersebut. Rentang waktu 1968 sampai 1979 merupakan masa terindah dalam riwayat hubungan kedua negara dimana Riyadh cenderung mempunyai hubungan yang harmonis dengan Teheran.

Memasuki era 70an hubungan Saudi dan Iran mulai menghangat. Kebijakan modernisasi militer Iran yang semakin menambah kekuatan negara tersebut menghadirkan kekhawatiran di pihak Saudi. Dengan kekuatan militer barunya, Iran mempunyai potensi untuk mendominasi kawasan, hal tersebut tentu menjadi kabar buruk bagi Saudi. Setelah Iran memasuki masa Revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini, praktis hubungan Arab Saudi dan Iran banyak diwarnai dengan ketegangan dan konflik. Pasca revolusi, Iran mengalami banyak perubahan fundamental, perubahan yang turut berimbas pada pendekatan kebijakan luar negeri.

⁷[Press TVIran-Saudi Arabia come to blows over Yemen](http://www.presstv.com/detail.aspx?id=116192§ionid=351020101), 15 January 2010. <http://www.presstv.com/detail.aspx?id=116192§ionid=351020101>. Diakses pada 13 April 2016

⁸Kaven L. Afrasiab, "Saudi-Iran Tension Fuel Wider Conflict" Asia Times, 6 December 2006. http://www.atimes.com/atime/Middle_East/HLO6AKo4.html. Diakses pada 18 April 2016

Perubahan ini memicu kekhawatiran pihak Saudi. Setidaknya ada dua hal yang memicu kekhawatiran Saudi. Pertama, ambisi Ayatollah Khomeini untuk menyebarkan semangat revolusi islamnya ke negara-negara kawasan; Yang kedua, sikap Iran yang secara frontal anti-Amerika Serikat dan Barat. Dua hal yang ini memicu kemarahan pihak Riyadh lantaran Saudi merupakan negara monarki absolut yang jelas menjadi salah satu sasaran kampanye ekspor revolusi Iran, dan Amerika merupakan salah satu sekutu terdekat sekaligus pelindung kepentingan Arab Saudi, terutama terkait isu-isu seputar kawasan.

Saat terjadi perang Iran-Iraq pada tahun 1980an, Arab Saudi menjadi penyokong utama pihak Iraq. Pemerintah Saudi mengucurkan tak kurang dari 25 juta USD untuk membantu pemerintah Saddam Husein menghadapi Iran. Sejatinya Arab Saudi mempunyai hubungan yang kurang baik dengan Partai Baath yang saat itu merupakan partai penguasa di Iraq, Saudi memilih untuk mengabaikan hal tersebut namun demi membendung Iran. Saudi bahkan mendorong negara-negara teluk lainnya, termasuk Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab, untuk ikut membantu mengucurkan dana bagi Iraq juga.⁹ Periode ini menjadi babak baru hubungan Arab Saudi Iran dimana Saudi melihat Iran sebagai ancaman serius terhadap kepentingan nasional dan stabilitas di kawasan.

Pembahasan

Rivalitas Saudi-Iran di Yaman Pasca Arab Spring

Rivalitas Saudi dan Iran merupakan persaingan dalam memperebutkan pengaruh di kawasan. Rivalitas ini meluas dan melibatkan negara lain sebagai medan pertarungan. Dalam studi hubungan internasional dikenal konsep *sphere of influence* yang dimaknai sebagai klaim dari sebuah negara secara eksklusif atau kontrol yang dominan atas sebuah area atau wilayah asing diluar wilayah yurisdiksinya. Istilah ini mengarah pada klaim politis untuk kontrol yang eksklusif dimana negara lain tidak akan mengakui, atau akan mengarah pada perjanjian

⁹ Wikipedia

hukum dimana negara lain akan menahan diri untuk tidak mengintervensi didalam lingkaran pengaruh yang ada.

Istilah ini mulai populer sejak tahun 1880an ketika ekspansi koloni dari Eropa masuk ke Afrika dan Asia. Dalam catatan sejarah, perebutan *sphere of influence* terjadi dalam beberapa episode yang selalu melibatkan pertarungan dua kekuatan dominan.

Pada abad 18, Inggris terlibat perebutan daerah pengaruh yang memperebutkan teluk guinea. Pertarungan ini berujung pada perjanjian antara Inggris dan Jerman pada bulan Mei 1885 yang memutuskan batasan dari pengaruh kedua negara tersebut atas teluk guinea. Perjanjian ini kemudian diikuti oleh beberapa lainnya, yang mana ada pasal VII dari perjanjian antara Inggris dan Jerman pada tanggal 1 Juli 1890 tentang Afrika Timur yang bisa dikatakan serupa. Isinya sbb: Kedua kekuatan tidak akan mengintervensi satu sama lain sebagaimana yang telah disebutkan ada pasal 1-4. Satu kekuatan tidak akan berada pada lingkaran pengaruh kekuatan lain dalam mengakuisisi, membuat perjanjian, mengakui hak atau perlindungan, ataupun menghalangi perluasan pengaruh dari yang lain.

Pada masa lampau, konflik antara Roma dan Carthage untuk pengaruh atas Mediterania barat berujung pada Perang Punic yang dimulai pada abad ketiga. Sedangkan di masa perang dingin, Amerika Serikat terlibat dalam perebutan daerah pengaruh yang terjadi di banyak negara terutama di kawasan Asia.

Dalam perebutan daerah pengaruh selalu melibatkan dua kekuatan dominan yang saling bertarung memperebutkan satu atau beberapa wilayah, dan negara satelit yang sering kali menjadi medan pertarungan dua kekuatan dominan tersebut.

Merujuk pada konsep daerah pengaruh tersebut, Rivalitas antara Kerajaan Arab Saudi dan Iran di Yaman merupakan representasi mutakhir dari perebutan daerah pengaruh di kawasan teluk. Perubahan rezim di Yaman bisa menggeser peta daerah pengaruh Saudi dan Iran, dalam hal ini Yaman yang sebelumnya berada dibawah pengaruh Saudi, terancam dengan peristiwa pendudukan Houthi yang mendeklarasikan Dewan Revolusi.

Houthi merupakan organisasi yang di gerakkan oleh kelompok Zaidi, sebuah cabang dari Syiah yang mempunyai penganut cukup banyak di Yaman. Jumlah penganut Zaidi mencapai 45% dari total populasi di negara tersebut, sedangkan yang terafiliasi dalam gerakan Houthi berkisar sekitar 30% dari total populasi. Sejak mencatat, Zaidi memerintah negeri Yaman (Utara) selama 1.000 tahun lebih sampai tahun 1962. Selama periode tersebut, mereka mempertahankan kemerdekaan dengan tangguh dan banyak terlibat dalam pertempuran melawan kekuatan-kekuatan asing yang pada saat itu mengendalikan wilayah Yaman bagian selatan.

Pendekatan dan strategi gerakan Houthi dalam banyak hal disinyalir mirip dengan Hezbollah di Lebanon, gerakan yang juga berbasis pada aliran yang sama dan didukung Iran. Keduanya mempunyai doktrin militer dan imaji perjuangan yang sama yang berkiblat pada revolusi Iran. Sebagai konsekuensinya, Houthi sering kali di tuduh berafiliasi dan didukung oleh Iran.¹⁰

Houthi sendiri menegaskan bahwa gerakan mereka merupakan reaksi perlawanan terhadap ekspansi salafiyah di Yaman, sekaligus sebagai upaya membela komunitasnya dari diskriminasi yang dilakukan rezim penguasa. Pemerintah Yaman menuduh pemberontakan Houthi bertujuan untuk mendestabilkan pemerintahan, menggulingkan rezim dan menggantinya dengan hukum agama yang dianut Zaidi. Pemerintah juga menuding bahwa Houthi mempunyai keterikatan dengan kekuatan pendukung di luar, dalam hal ini pemerintah Iran.

Naiknya Houthi telah merubah konfigurasi politik di internal negara Yaman dimana kelompok Syiah mendapatkan momentum untuk mengakses kuasa. Houthi—yang mempunyai kedekatan ideologis dan diduga berafiliasi dengan Iran, akan mengurangi radius pengaruh Arab Saudi di satu sisi, dan memperluas daerah pengaruh Iran di sisi lain. Meski merupakan negara miskin, namun Yaman merupakan negara yang mempunyai kepadatan cukup tinggi dengan populasi lebih dari 25 juta penduduk. Jika dibiarkan, perubahan

¹⁰["Houthis seek to impose a new reality on Yemen". The National. 23 September 2014.](http://www.thenational.ae/opinion/houthis-seek-to-impose-a-new-reality-on-yemen)<http://www.thenational.ae/opinion/houthis-seek-to-impose-a-new-reality-on-yemen>

konfigurasi politik Yaman ini berpotensi menggeser peta rivalitas pengaruh Saudi dan Iran di kawasan. Mempertimbangkan hal tersebut, maka reaksi keras Saudi terhadap pergolakan di Yaman bisa di pahami.

Belum lagi jika mempertimbangkan faktor geografis, Yaman merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Keduanya mempunyai garis perbatasan darat yang cukup panjang yaitu di bagian selatan Arab Saudi dan wilayah utara Yaman. Yang tak kalah menarik untuk di catat dalam hal ini adalah, wilayah utara Yaman ini merupakan salah satu basis utama Houthi.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Untuk mengkaji lebih jauh pertarungan pengaruh Arab Saudi dan Iran di Yaman, selain mengacu pada sejarah politik dan tren kebijakan luar negeri saat ini di Timur Tengah, penting juga untuk mengelaborasi faktor-faktor yang mempengaruhi rivalitas kedua negara. Banyak pengamat yang melihat persaingan antara Arab Saudi dan Iran cenderung di pengaruhi oleh berbagai perbedaan antara keduanya yang mencakup: Sektarianisme, nasionalisme, ideologi revolusioner, persaingan atas hegemoni regional, politik perdagangan minyak, kebijakan terhadap kehadiran AS di Teluk, dan perselisihan haji.

Berbagai perbedaan identitas politik ini cukup fundamental dalam menjelaskan persaingan Saudi-Iran, pasang surut hubungan antara kedua negara, dan perubahan-perubahan pendekatan dalam kebijakan luar negeri keduanya. Politik identitas di sini mengacu pada anasir-anasir yang mencakup seputar identitas etnis, ras atau agama yang bisa dipakai sebagai klaim yang melegitimasi pemegang kekuasaan dalam memutuskan arah kebijakan negara. Anasir-anasir yang dimaksud melingkupi faktor ideasional dan material yang menunjukkan bagaimana perubahan identitas negara—terutama dalam wacana kebijakan luar negeri resmi—tampak mempengaruhi perubahan kebijakan, dan pergeseran pola persahabatan-permusuhan antara kedua negara.¹¹

¹¹Mary Kaldor. *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*. (Stanford, CA: Stanford University Press, 2007), 80

Penting untuk dicatat bahwa sebuah negara bisa terdiri dari tiga komponen struktural utama: 1) komponen ideasional, yang mencakup cita-cita luhur yang melandasi usaha pemenuhan fungsi dasar pemerintahan untuk menyediakan perlindungan dari ancaman internal dan eksternal, menghadirkan tertib aturan dan menyediakan kebutuhan pokok hidup; 2) Komponen Kelembagaan, yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif yang mengatur sistem dan hukum dasar, prosedur dan norma-norma; 3) komponen fisik, yaitu populasi yang menyediakan potensi sumber daya yang dapat dimobilisasi melalui pembangunan ekonomi dan memberikan kontribusi untuk negara dengan menyediakan modal manusia. Komponen fisik ini juga termasuk wilayah suatu negara dan semua alam resources.¹²

Identitas kolektif menyediakan individu dengan informasi yang mereka butuhkan dalam untuk membentuk opini tentang diri mereka sendiri dan lainnya. Selain itu, identitas terbentuk dalam kaitannya dengan dan dari interaksi dengan lainnya. Proses identifikasi identitas kolektif ini berjalan secara berkelanjutan melalui anasir negatif dan positif dan menentukan posisi pandang dalam melihat yang lain. Konsepsi identitas politik menjadi batasan dalam melihat yang lain sebagai liyan atau sebagai bagian dari Identitas yang sama. Identitas kolektif juga memberikan kerangka acuan yang menjadi penuntun arah dalam menentukan posisi, sikap, dan tindakan yang akan diambil. Dalam wilayah negara, identitas negara mempengaruhi kebijakan luar negeri dan sebaliknya, kebijakan luar negeri pada titik tertentu dapat mempengaruhi identitas negara. Dengan demikian, elit politik yang berkuasa dapat memanipulasi politik identitas untuk membenarkan kebijakan termasuk perang.

Politik identitas di Timur Tengah berbeda dengan kebanyakan kawasan lain. Di Timur Tengah, selain faktor kesukuan, politik identitas banyak di pengaruhi oleh isu-isu sektarianisme atau apa yang di sebut *Ashabiyah*. Dalam hal ini, Arab Saudi mendasarkan negaranya pada Islam Sunni, sedangkan Iran merupakan negara representasi Islam Syiah.

¹²Barry Buzan, *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. ECPR Classics (Colchester: ECPR Press, 2007), pgs. 83-88

Untuk memahami sejauh mana faktor *ashabiyah* yang menjadi identitas politik kedua negara ini melatari dan mempengaruhi konflik keduanya, kita perlu untuk melacak kembali konteks historis hubungan sunni-syiah. Ada banyak pengamat yang melihat konflik keras yang ditandai dengan perpecahan yang mendalam dan klasik perseteruan antara Sunni dan Syiah dapat ditelusuri kembali dengan melacak kembali masa awal eksistensi Islam itu sendiri. Konflik Sunni-Syiah adalah perpecahan politik dan agama yang berasal mula dari hari ketika Nabi Ummat Islam Muhammad wafat pada 632 M. Wafatnya pemimpin agama dan politik yang tanpa meninggalkan wasiat ini memunculkan perdebatan tentang pewaris sah tahta Islam.

Sebagian ummat berasumsi bahwa kepemimpinan Islam harus dilanjutkan oleh seorang yang memiliki garis darah dengan Muhammad, sebaian lainnya beranggapan suksesi kepemimpinan tak mutlak harus berdasar pertalian darah. Mereka yang percaya bahwa kepemimpinan harus dilanjutkan oleh seorang yang memiliki ikatan keluarga dengan Muhammad ini mendukung Ali untuk naik tahta dan kemudian dikenal sebagai Syiah. Sedangkan mayoritas ummat percaya bahwa Abu Bakar merupakan orang yang paling tepat dan layak meneruskan kepemimpinan Muhammad dan, karena tidak ada instruksi yang tertinggal mengenai hal ini, kepemimpinan harus berdasarkan konsensus pendapat. kelompok mayoritas ini selanjutnya dikenal sebagai Sunni.⁴⁸ Dari total 1,6 miliar Muslim di dunia, sekitar 1,3 miliar adalah berfaham Sunni dan kira-kira hanya 200 juta yang menganut Syiah.

Sepeninggal Khalifah Utsman, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi Khalifah. Pengangkatan Ali ini menyisakan sebuah persoalan. Para pembaiat Ali disinyalir punya andil besar dalam pembunuhan Utsman. Mereka adalah 600 orang dari Mesir yang menggeruduk kediaman Utsman di Madinah. Atas tindak pembunuhan itu, Aisyah, istri Nabi Muhammad sekaligus kerabat Utsman memimpin pasukan untuk menentang Ali. Ia menuntut agar segera ditegakkan hukum *qishash* (hukuman yang setimpal bagi para pelaku, dalam hal ini membunuh dihukum dibunuh). Perang Jamal tak terelakkan, pasukan Aisyah akhirnya dapat ditaklukkan oleh pasukan Ali.

Selanjutnya datang lagi perlawanan dari Muawiyah bin Abi Sufyan (Gubernur Syam saat itu). Muawiyah menolak berbaiat kepada Ali, lalu Ali dan pasukannya memerangi Muawiyah. Terjadilah Perang Shiffin yang kemudian berakhir dengan *tahkim* (arbitrase).

Dalam perundingan itu, pihak Ali diwakili oleh Abu Musa Al-Asyari dan Amru ibn Ash sebagai wakil Muawiyah. Hasilnya, secara sepihak Amru bin Ash mengangkat Muawiyah sebagai khalifah setelah sebelumnya berhasil meminta Ali dan Muawiyah turun jabatan untuk sementara.

Kaum muslimin pun terpecah menyikapi hasil arbitrase yang tidak adil itu. Di antara mereka ada ribuan pengikut Ali yang menolak *tahkim* dan keluar dari barisan Ali. Mereka dikenal sebagai kelompok Khawarij yang ekstrem. Atas makar kaum Khawarij inilah Khalifah Ali terbunuh. Suasana makin runyam. Dengan pertimbangan agar umat Islam bersatu, Hasan putra tertua Ali tidak bersedia diangkat menjadi Khalifah meski banyak yang meminta. Dengan demikian, Muawiyah dikukuhkan sebagai Khalifah. Tahun 60 H, Muawiyah wafat. Sebelumnya ia telah menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah dengan ibu kota kekhalifahan Syam (Suriah). Sementara di Madinah, Hussein yang merupakan adik Hasan sekaligus cucu Nabi Muhammad SAW menerima 500 pucuk surat lebih dari orang-orang Kufah (Irak) yang menyatakan akan membaiainya sebagai khalifah.

Di Kufah, banyak orang yang sangat menginginkan Hussein menjadi khalifah. Mereka telah membaiait Hussein melalui perantara Muslim bin Aqil. Atas permintaan itu Hussein berangkat ke Irak. Yazid mendengar kabar itu. Ia mengutus Ubaidullah bin Ziyad menuju Kufah untuk mencegah Hussein masuk ke Irak dan meredam pemberontakan penduduk Kufah terhadap otoritas kekhalifahan. Pada hari kesepuluh bulan Muharram, Hussein beserta pengikutnya sampai di daerah Karbala.

Tibalah 4.000 pasukan yang dikirim oleh Ubaidullah bin Ziyad dengan pimpinan pasukan Umar bin Saad. Terjadilah peperangan yang sangat tidak imbang antara 73 orang di pihak Hussein dengan 4.000 pasukan Irak. Seluruh pengikut Hussein tewas, tinggallah Hussein seorang diri. Hussein pun gugur

dengan mengenaskan. Peristiwa itu dikenal dengan tragedi Karbala. Sebuah peristiwa yang tiap tanggal 10 Muharram diratapi dan didramatisasi hingga kini oleh pengikut Syiah. Dari peristiwa Karbala inilah kaum Syiah membangun basis ideologi mereka. Tiap tahun kematian Husein diperingati dengan ritual tahunan hari As-Syura yang berpusat di Iran. Asyura bermakna sepuluh (Arab: *'a-sya-ra*), sesuai tanggal kejadian tragedi Karbala.

Sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya, perpecahan ini terus berlangsung dari masa-ke masa, dan melahirkan banyak benturan serta konflik antara kedua aliran terbesar dalam islam ini. Setelah gesekan panjang dan mendalam sejak masa kekhalifahan, kini konflik dua aliran besar dalam Islam tersebut paling tampak berlangsung dalam wujud rivalitas antara dua negara islam, yaitu Arab Saudi dan Iran. Saudi yang mayoritas Sunni dan Iran yang Syiah menjadi representasi mutakhir pertarungan dua aliran ini. Keduanya secara sadar dan tegas saling mengklaim diri dan kebijakan mereka sebagai "negara Islam yang benar." Arab Saudi dan Iran berpendapat bahwa masyarakat dan sistem tata negara mereka didasarkan pada perwujudan nilai-nilai normatif Islam dan bahwa rezim mereka memerintah rakyat atas dasar hukum ilahi dan Syariah, prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah-tradisi Muhammad dan generasi awal umat Islam.